



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a BAB I PENDAHULUAN
- b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM. . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 Juli 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD



LAMPIRAN XXXIX : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 281 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
BENGKONG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BENGKONG TAHUN 2025





**PEMERINTAH
KOTA BATAM**



PERUBAHAN RENJA

**KECAMATAN BENGKONG
TAHUN ANGGARAN 2025**



JL RAYA SADAI NO 1, BENGKONG



(0 778) 4 10 0 146



KECAMATANBENGKONG@GMAIL.COM

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bengkong Tahun 2025 ini.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bengkong adalah dokumen perencanaan Kecamatan Bengkong untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bengkong mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bengkong Tahun 2025 ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Bengkong dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna mensukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Bengkong, 1 Juli 2025

CAMAT BENGKONG



M. FAIRUS R. BATUBARA, S. STP, M.Si
NIP. 19820620 200112 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantari

Daftar Isiii

Daftar Tabel.....iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Landasan Hukum..... 3

 1.3 Maksud dan Tujuan 6

 1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH s.d
 TRIWULAN I TAHUN 2025..... 8

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah
 Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Rencana Strategis
 Perangkat Daerah 8

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 13

 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
 Perangkat Daerah..... 14

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
 DAERAH..... 17

BAB IV PENUTUP 49

LAMPIRAN:

- SK Tim Penyusun Perubahan Renja Kecamatan Bengkong TA 2025;

- Form E.70 (Permendagri 86/2017);

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Batam.....10

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Kecamatan Bengkong Tahun 2025 s/d Triwulan I.....13

Tabel 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bengkong Tahun 2025 s/d Triwulan I.....13

Tabel 3.1 Rincian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2025.....18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala

Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 7/000.7.2/IV/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025 maka Kecamatan Bengkong Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam

menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana .Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119).
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 121).
20. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

21. Instruksi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
25. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 42 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam.
26. Peraturan Walikota Batam Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. (Khusus untuk Kecamatan)
27. Peraturan Walikota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Bengkong Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2025 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Kecamatan Bengkong Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Penyusunan Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bengkong Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum
- 3.1 Maksud dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (TAHUN BERJALAN)

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I (Tahun Berjalan)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Triwulan I Tahun 2025**

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD.

Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut:

2.1.1 Realisasi program/kegiatan triwulan I tahun 2025 yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, terdapat pada:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja program “Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan tahun berjalan 2025 adalah 15.83%.
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan indikator kinerja program “Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan tahun berjalan 2025 adalah 68%.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dengan indikator kinerja program “Cakupan Koordinasi

Kegiatan Pemberdayaan Desa, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan tahun berjalan 2025 adalah 1.1%, 2.68%.

- Program Pengelolaan Persampahan “Cakupan Pengelolaan Sampah”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan tahun berjalan 2025 adalah 27.62%.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja program “Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan tahun berjalan 2025 adalah 1. 25% ; 2.27%.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan triwulan I tahun 2025 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena masih ada pelaksanaan kinerja yang dilakukan di TW II, III dan TW IV.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan triwulan I tahun 2025 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena masih ada pelaksanaan kinerja yang dilakukan di TW I, TW III dan TW IV.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan I

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bengkong

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1		2	3	4	5	6=5/4*100
2.1		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	8%	2,21%	27,62%
1.1						
1	2.0 1	Pengelolaan Sampah	Persentase Pengangkutan Sampah	92%	27,00%	29,34%
7.0		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100%	15,83%	15,83%
1.0						
1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	23,00%	23,00%
	2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	0%	0%	0,00%
	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	36,00%	36,00%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
	2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	0,00%	0,00%
	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	31,00%	31,00%
	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	5,00%	5,00%
7.0 1.0 2		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1.100%; 2.100%	1.25%; 2.27%	1.25%; 2.27%
	2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	27,00%	27,00%
7.0 1.0 4		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyediaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-
	2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyediaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
7.0		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	68,00%	68,00%
	2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	68,00%	68,00%
7.0 1.0 3		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	1.Persentase Saprass kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	1. 10%	1,00%	1,00%
			2. Persentase warga yang berdaya	2. 100%	68,00%	68,00%
	2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan kelurahan)	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; persentase sapras kelurahan yang dibangun	10%	1,00%	1,00%
	2.0 6	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100%	68,00%	68,00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bengkong Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Kecamatan Bengkong Tahun 2025 s/d Triwulan I

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025 TW I		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase pelayanan pengangkutan sampah di Kecamatan	Persen	92	Persen	27	
2	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana	Persen	100	Persen	49,83%	
3	persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen	100	Persen	50,67%	

Tabel 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bengkong Tahun 2025 s/d Triwulan I

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah (Berkas)	Rata-rata Waktu Penyelesaian
1	KTP Baru/Perpanjangan	1.584	7-14 Hari
2	KK	481	10-14 Hari
3	KARTU KUNING (AK1)	524	14 Menit
4	SURAT PINDAH	62	14 Menit
5	DISPENSASI NIKAH	-	14 Menit
6	AHLI WARIS	60	70 Menit
7	PEREKAMAN	312	14 Menit
8	PENGAMBILAN KTP	876	14 Menit
9	PENGAMBILAN KK	205	14 Menit
10	SURAT KETERANGAN DOMISILI YAYASAN/ORGANISAS I	1	14 Menit
11	SURAT KETERANGAM DOMISILI RUMAH IBADAH	-	-

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berikut Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dihadapi oleh Kecamatan Bengkong:

A. Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum

1. Pelayanan Administrasi

- Isu: Layanan administrasi kependudukan yang lambat dan birokratis.
- Faktor penyebab: Kurangnya sumber daya manusia, sistem informasi yang tidak terintegrasi, dan prosedur yang rumit.

2. Pengelolaan Data

- Isu: Data kependudukan yang tidak akurat dan tidak up-to-date.
- Faktor penyebab: Kurangnya sumber daya manusia, sistem informasi yang tidak terintegrasi, dan kurangnya pelatihan bagi staf.

B. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengembangan Infrastruktur

- Isu 1: Pembangunan infrastruktur yang tidak merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Faktor penyebab: Kurangnya perencanaan yang efektif, kurangnya anggaran, dan kurangnya koordinasi dengan Perangkat RT,RW, LPM dan Masyarakat.
- Isu 2: Sebanyak 50% anggaran PSPK di Kecamatan Bengkong yang tidak dapat dilaksanakan/dikerjakan.
- Faktor penyebab: Dampak efisiensi dari Inpres No. 1 tahun 2025.

2. Pengembangan Ekonomi

- Isu: Pengembangan ekonomi lokal yang lambat dan tidak efektif.
- Faktor penyebab: Kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya dukungan dari pemerintah Kecamatan Bengkong akibat Keterbatasan Anggaran.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Isu: Pengembangan sumber daya manusia yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Faktor penyebab: Kurangnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran, dan kurangnya pelatihan yang efektif.

C. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

1. Pelayanan Kesehatan

- Isu: Pelayanan kesehatan yang tidak merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Faktor penyebab: Kurangnya sumber daya manusia, kurangnya fasilitas kesehatan, dan kurangnya akses ke layanan kesehatan.

2. Penanganan Masalah Sosial

- Isu: Penanganan masalah sosial yang lambat dan tidak efektif.
- Faktor penyebab: Kurangnya sumber daya manusia, kurangnya koordinasi dengan Dinas terkait

3. Pengembangan Masyarakat

- Isu: Pengembangan masyarakat yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Faktor penyebab: Kurangnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran, dan kurangnya pelatihan yang efektif.

D. Bidang Trantib

1. Pengawasan dan Pengendalian

- Isu: Pengawasan dan pengendalian yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Faktor penyebab: Kurangnya sumber daya manusia, kurangnya koordinasi dengan Dinas terkait.

2. Penanganan Masalah Ketertiban

- Isu: Penanganan masalah ketertiban yang lambat dan tidak efektif.

- Faktor penyebab: Kurangnya sumber daya manusia, kurangnya koordinasi dengan Dinas terkait.

3. Penanganan Masalah Persampahan

- Isu 1: Penanganan masalah sampah yang berserakan di jalan lingkungan masyarakat dan TPS.
- Faktor Penyebab: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung masalah persampahan.
- Isu 2: Penanganan masalah sampah yang menumpuk di TPS.
- Faktor Penyebab: Kurangnya jumlah bin kontainer di TPS dan lambatnya pengangkutan dari TPS ke TPA yang dilakukan oleh mobil sampah Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bengkong Kota Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025

Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu dapat dilihat di Tabel 3.1 sebagai berikut;

Tabel 3.1 Rincian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
1	2					3	4		8	9	10	11	12
						KELURAHAN BENGKONG LAUT					35.533.582.872,00	34.624.203.788,00	27.925.784.876,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					31.887.945.212,00	31.124.995.128,00	24.300.696.746,00
	7	01				KECAMATAN					31.887.945.212,00	31.124.995.128,00	24.300.696.746,00
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks Pelayanan Keseekretariatan Kecamatan Bengkong	-	90.58 %	12.448.846.612,00	12.870.935.094,00	13.558.249.366,00
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 %	641.910.300,00	439.323.300,00	177.971.300,00
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.282.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	3 Paket	9.792.000,00	9.792.000,00	9.792.000,00
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	76.812.000,00	17.772.000,00	5.472.000,00
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	5.400.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100 %	684.103.640,00	988.217.352,00	837.126.168,00
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	44.998.000,00	44.998.000,00	44.998.000,00
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	0,00	600.000,00	600.000,00
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	100 %	318.608.500,00	180.076.500,00	270.131.500,00
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	600.000,00	0,00	0,00
2	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir di Renja Kecamatan Bengkong	-	1. 10%; 2. 100 %	12.567.459.600,00	11.752.585.134,00	4.808.386.480,00
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-	10 %	11.955.413.100,00	11.316.339.134,00	4.602.888.580,00
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	23.499.900,00	23.499.900,00	23.499.900,00
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	5 Unit	1.261.499.300,00	1.331.386.483,00	282.237.760,00
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	86.850.000,00	88.900.000,00	48.950.000,00
7	01	03	2.06			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan PKK yang direncanakan dibagi jumlah kegiatan PKK yang terlaksana	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana Kecamatan Bengkong	-	100 %	612.046.500,00	436.246.000,00	205.497.900,00
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga							
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	28.950.000,00	28.950.000,00	0,00
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah							
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga	28.950.000,00	14.935.600,00	0,00
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	100 Keluarga	100 Keluarga	28.950.000,00	14.933.200,00	12.183.200,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
							Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	0,00
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya							
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	0,00
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup							
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	100 Keluarga	100 Keluarga	28.950.000,00	14.933.200,00	12.183.200,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
							Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup					
3	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Bengkong	-	94.38 %	2.246.553.000,00	1.965.205.000,00	1.377.763.000,00
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Bengkong	-	10 Kegiatan	2.246.553.000,00	1.965.205.000,00	1.377.763.000,00
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	700 Orang	700 Orang	0,00	0,00	0,00
						KELURAHAN BENGKONG INDAH					35.533.582.872,00	34.624.203.788,00	27.925.784.876,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					31.887.945.212,00	31.124.995.128,00	24.300.696.746,00
	7	01				KECAMATAN					31.887.945.212,00	31.124.995.128,00	24.300.696.746,00
4	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks Pelayanan Keseekretariatan Kecamatan Bengkong	-	90.58 %	12.448.846.612,00	12.870.935.094,00	13.558.249.366,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
						DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 %	641.910.300,00	439.323.300,00	177.971.300,00
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	3 Paket	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	76.546.000,00	17.506.000,00	5.206.000,00
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	4 Paket	5.881.300,00	3.903.300,00	3.903.300,00
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100 %	684.103.640,00	988.217.352,00	837.126.168,00
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	35.680.800,00	35.680.800,00	35.680.800,00
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	0,00	600.000,00	600.000,00
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase Barang Milik- Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		100 %	318.608.500,00	180.076.500,00	270.131.500,00
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	600.000,00	0,00	0,00
5	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2.	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir di Renja Kecamatan Bengkong	-	1. 10%; 2. 100 %	12.567.459.600,00	11.752.585.134,00	4.808.386.480,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
							Persentase Warga yang berdaya						
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	11.955.413.100,00	11.316.339.134,00	4.602.888.580,00
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	23.499.900,00	23.499.900,00	23.499.900,00
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	9 Unit	1.883.658.600,00	1.575.105.384,00	890.928.420,00
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	121.210.000,00	121.210.000,00	50.630.000,00
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan	Jumlah kegiatan PKK yang direncanakan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan	-	100 %	612.046.500,00	436.246.000,00	205.497.900,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
						Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	dibagi jumlah kegiatan PKK yang terlaksana	Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana Kecamatan Bengkong					
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga							
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	28.950.000,00	28.950.000,00	0,00
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah							
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga	28.950.000,00	14.933.200,00	0,00
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga	28.950.000,00	14.933.200,00	12.183.200,00
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	0,00
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya							
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	0,00
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup							
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga	28.950.000,00	14.933.200,00	12.183.200,00
6	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat	-	94.38 %	2.246.553.000,00	1.965.205.000,00	1.377.763.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
								Beragama di Kecamatan Bengkong					
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan	Jumlah Kegiatan Urusan- Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Bengkong		10 Kegiatan	2.246.553.000,00	1.965.205.000,00	1.377.763.000,00
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	700 Orang	700 Orang	0,00	0,00	0,00
						KELURAHAN SADAI					35.533.582.872,00	34.624.203.788,00	27.925.784.876,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					31.887.945.212,00	31.124.995.128,00	24.300.696.746,00
	7	01				KECAMATAN					31.887.945.212,00	31.124.995.128,00	24.300.696.746,00
7	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks Pelayanan Keseekretariatan Kecamatan Bengkong		90.58 %	12.448.846.612,00	12.870.935.094,00	13.558.249.366,00
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100 %	641.910.300,00	439.323.300,00	177.971.300,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	954.000,00	954.000,00	954.000,00
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Paket	3 Paket	14.334.000,00	14.334.000,00	14.334.000,00
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	77.224.000,00	18.184.000,00	5.884.000,00
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	4 Paket	8.466.000,00	5.484.000,00	5.484.000,00
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100 %	684.103.640,00	988.217.352,00	837.126.168,00
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	33.800.000,00	33.800.000,00	33.800.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	0,00	600.000,00	600.000,00
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase Barang Milik- Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	100 %	318.608.500,00	180.076.500,00	270.131.500,00
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	600.000,00	0,00	0,00
8	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir di Renja Kecamatan Bengkong	-	1. 10%; 2. 100 %	12.567.459.600,00	11.752.585.134,00	4.808.386.480,00
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2.	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	11.955.413.100,00	11.316.339.134,00	4.602.888.580,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
							Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan						
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	23.499.900,00	23.499.900,00	23.499.900,00
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit	11 Unit	4.346.620.200,00	3.752.206.559,00	1.184.484.500,00
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	63.680.000,00	61.630.000,00	26.340.000,00
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan PKK yang direncanakan dibagi jumlah kegiatan PKK yang terlaksana	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana		100 %	612.046.500,00	436.246.000,00	205.497.900,00
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	29.600.200,00	28.900.200,00	0,00
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah							
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga	29.600.200,00	14.933.200,00	0,00
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga	29.600.200,00	14.933.200,00	12.183.200,00
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan	100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
							Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya							
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	0,00
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup							
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga	29.600.200,00	14.933.200,00	12.183.200,00
9	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Bengkong	-	94.38 %	2.246.553.000,00	1.965.205.000,00	1.377.763.000,00
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan	Jumlah Kegiatan Urusan- Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Bengkong	-	10 Kegiatan	2.246.553.000,00	1.965.205.000,00	1.377.763.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	700 Orang	700 Orang	0,00	0,00	0,00
						KELURAHAN TANJUNG BUNTUNG					35.533.582.872,00	34.624.203.788,00	27.925.784.876,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					31.887.945.212,00	31.124.995.128,00	24.300.696.746,00
	7	01				KECAMATAN					31.887.945.212,00	31.124.995.128,00	24.300.696.746,00
10	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Bengkong	-	90.58 %	12.448.846.612,00	12.870.935.094,00	13.558.249.366,00
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 %	641.910.300,00	439.323.300,00	177.971.300,00
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1.776.000,00	1.776.000,00	1.776.000,00
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	49 Paket	3 Paket	12.119.000,00	12.119.000,00	12.119.000,00
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	78.123.000,00	19.083.000,00	6.783.000,00
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	3 Paket	7.637.000,00	5.010.000,00	5.010.000,00
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100 %	684.103.640,00	988.217.352,00	837.126.168,00
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	58.209.000,00	58.209.000,00	58.209.000,00
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	0,00	600.000,00	600.000,00
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	100 %	318.608.500,00	180.076.500,00	270.131.500,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
						Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana						
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	600.000,00	0,00	0,00
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir di renja Kecamatan Bengkong	-	1. 10%; 2. 100 %	12.567.459.600,00	11.752.585.134,00	4.808.386.480,00
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	11.955.413.100,00	11.316.339.134,00	4.602.888.580,00
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	7 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	23.499.900,00	23.499.900,00	23.499.900,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
							Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	23 Unit	3.957.795.400,00	4.151.801.308,00	1.967.952.800,00
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	140.100.000,00	140.099.800,00	57.365.500,00
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan PKK yang direncanakan dibagi jumlah kegiatan PKK yang terlaksana	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana Kecamatan Bengkong		100 %	612.046.500,00	436.246.000,00	205.497.900,00
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga							
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	29.600.200,00	29.600.100,00	24.100.100,00
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah							
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	29.600.200,00	14.933.200,00	12.183.200,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
							dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah					
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga	29.600.200,00	14.933.200,00	12.183.200,00
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	0,00
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya							
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
							melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya					
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup							
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga	29.600.200,00	14.933.200,00	12.183.200,00
12	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Bengkong	-	94.38 %	2.246.553.000,00	1.965.205.000,00	1.377.763.000,00
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Bengkong	-	10 Kegiatan	2.246.553.000,00	1.965.205.000,00	1.377.763.000,00
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	700 Orang	700 Orang	0,00	0,00	0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
							Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					
j						KECAMATAN BENGKONG					35.533.582.872,00	34.624.203.788,00	27.925.784.876,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.645.637.660,00	3.499.208.660,00	3.625.088.130,00
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					3.645.637.660,00	3.499.208.660,00	3.625.088.130,00
13	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	Volume sampah yang ditangani oleh Kecamatan	50.370 Ton	50.370 Ton	3.645.637.660,00	3.499.208.660,00	3.625.088.130,00
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Pengangkutan Sampah	Persentase sarana dan prasarana penanganan sampah dalam kondisi baik	100%	100%	3.645.637.660,00	3.499.208.660,00	3.625.088.130,00
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00
	2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan							
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	-	-	3.645.637.660,00	3.499.208.660,00	3.625.088.130,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					31.887.945.212,00	31.124.995.128,00	24.300.696.746,00
	7	01				KECAMATAN					31.887.945.212,00	31.124.995.128,00	24.300.696.746,00
14	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Indeks Pelayanan Keseekretariatan Kecamatan Bengkong 2. Nilai SAKIP	-	1. 90.58 % 2. 71.62 %	12.448.846.612,00	12.870.935.094,00	13.558.249.366,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
						DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	-	100 %	10.571.222.172,00	11.033.114.942,00	11.803.540.398,00
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	61 Orang/bulan	10.571.222.172,00	10.915.214.942,00	11.685.640.398,00
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	117.900.000,00	117.900.000,00
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 %	641.910.300,00	439.323.300,00	177.971.300,00
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	8.442.000,00	8.442.000,00	5.427.000,00
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	112.837.000,00	68.964.000,00	40.518.000,00
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	23.224.000,00	6.724.000,00	5.064.000,00
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	54.193.000,00	44.203.000,00	36.403.000,00
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	1 Laporan	57.578.000,00	171.231.000,00	0,00
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai rencana kebutuhan	-	100 %	233.002.000,00	230.203.000,00	469.480.000,00
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	48.946.000,00	0,00	0,00
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	15 Unit	184.056.000,00	71.210.000,00	310.487.000,00
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	158.993.000,00	158.993.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	684.103.640,00	988.217.352,00	837.126.168,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	204.611.200,00	204.611.200,00	204.611.200,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	12 Laporan	306.804.640,00	608.518.352,00	457.427.168,00
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		100 %	318.608.500,00	180.076.500,00	270.131.500,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	38.490.000,00	0,00	0,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	20 Unit	24 Unit	96.196.500,00	128.606.500,00	128.606.500,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
							Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit	73 Unit	49.970.000,00	49.970.000,00	21.335.000,00
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	5 Unit	130.052.000,00	0,00	118.690.000,00
15	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Bengkong	-	75%	4.625.086.000,00	4.536.269.900,00	4.556.297.900,00
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK) Kecamatan Bengkong	7 Lembaga	326 LKK	4.625.086.000,00	4.536.269.900,00	4.556.297.900,00
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	4 Laporan	221.086.000,00	132.269.900,00	121.469.900,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.404.000.000,00	4.404.000.000,00	4.434.828.000,00
16	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir di renja Kecamatan Bengkong		1. 10%; 2. 100 %	12.567.459.600,00	11.752.585.134,00	4.808.386.480,00
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan PKK yang direncanakan dibagi jumlah kegiatan PKK yang terlaksana	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana di Kecamatan Bengkong		100 %	612.046.500,00	436.246.000,00	205.497.900,00
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah							
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	29.889.900,00	26.889.900,00	0,00
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	113.755.000,00	113.755.000,00	71.749.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
							dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	0,00
17	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Bengkong		94.38 %	2.246.553.000,00	1.965.205.000,00	1.377.763.000,00
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Bengkong		10 Kegiatan	2.246.553.000,00	1.965.205.000,00	1.377.763.000,00
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Sebelum	Sesudah					
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	3000 Orang	3000 Orang	428.286.000,00	428.286.000,00	0,00
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5000 Orang	5000 Orang	1.347.851.000,00	1.347.851.000,00	1.212.695.000,00
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	2 Dokumen	470.416.000,00	189.068.000,00	165.068.000,00
J U M L A H											35.533.582.872,00	34.624.203.788,00	27.925.784.876,00

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Bengkong Tahun 2025 - 2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bengkong Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait kewilayahan, Kecamatan Bengkong Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

Permasalahan yang paling krusial saat ini adalah pengelolaan sampah yang belum tertangani secara maksimal. Sampah yang menumpuk di TPS, berserakan di lingkungan permukiman, serta lambatnya pengangkutan ke TPA telah menjadi keluhan masyarakat yang berulang. Berbagai faktor mempengaruhi situasi ini, mulai dari keterbatasan jumlah bin kontainer, tidak teraturnya jadwal pengangkutan oleh armada Dinas Lingkungan Hidup, hingga masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan. Permasalahan ini tidak hanya menciptakan kondisi lingkungan yang tidak sehat, tetapi juga berdampak pada persepsi publik terhadap efektivitas pelayanan pemerintah.

Selain itu, capaian kinerja pada program pemberdayaan masyarakat kelurahan juga menunjukkan angka yang rendah. Banyak kegiatan yang semestinya dapat meningkatkan partisipasi dan

kesejahteraan warga tidak dapat direalisasikan karena terdampak kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya jumlah kegiatan, baik fisik maupun non-fisik, yang seharusnya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di lingkungan kelurahan secara langsung.

Masalah lainnya adalah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PSPK) belum dapat dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, yang disebabkan oleh Peraturan Walikota Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaannya belum diterbitkan. Selain itu, penghapusan Tenaga Teknis di kelurahan juga menyulitkan proses penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas usulan kegiatan pembangunan kelurahan. Akibatnya, PPTK kesulitan menyusun dokumen perencanaan, dan proses pelaksanaan kegiatan ikut terhambat. Tanpa dukungan teknis yang memadai, perencanaan menjadi tidak optimal.

Ketiga permasalahan tersebut menjadi catatan penting dalam evaluasi kinerja Kecamatan Bengkong, yang harus segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah strategis, koordinatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah

direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja *Kecamatan Bengkong* Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja *Kecamatan Bengkong* Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

WALIKOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD